

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan KTTA ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mencari makna, pengertian, pemahaman, atau *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia berdasarkan interpretasi peneliti dalam suatu latar atau kondisi alamiahnya.

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data atau informasi yang digunakan untuk penulisan KTTA ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zedd, 2004). Sumber utama yang digunakan adalah peraturan-peraturan terkait dengan pemeliharaan BMN dan dokumen-dokumen terkait yang tersedia di KPKNL Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancara atau sumber informasi melalui komunikasi langsung, di mana pewawancara bertanya mengenai objek yang diteliti (Yusuf, 2014). Dalam

pengambilan sampel untuk wawancara, penulis akan menggunakan metode *snowball sampling*. Metode *snowball sampling* adalah metode yang dilakukan dengan cara peneliti mewawancarai sejumlah kecil narasumber yang sesuai dengan kriteria dan setuju untuk diwawancarai, kemudian narasumber tersebut akan diminta untuk merekomendasikan narasumber lain yang sesuai dengan kriteria dan berpotensi setuju untuk diwawancarai, yang kemudian merekomendasikan narasumber potensial lainnya, dan seterusnya (Parker, Scott, & Geddes, 2019). Berikut adalah narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

Tabel III.1 Daftar Narasumber

No.	Kode Narasumber	Jabatan Narasumber
1	Narasumber A	Kepala Seksi PKN KPKNL Semarang
2	Narasumber B	Pegawai Subbagian Umum bagian BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa KPKNL Semarang
3	Narasumber C	Pegawai Subbagian Umum bagian Keuangan KPKNL Semarang
4	Narasumber D	<i>Driver</i> Kendaraan Dinas KPKNL Semarang

3.2. Profil KPKNL Semarang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. KPKNL Semarang terletak di Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota

Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan PMK No. 154/PMK.06/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Semarang memiliki tiga belas wilayah kerja yang terdiri dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang.. Dalam memberikan pelayanannya, KPKNL Semarang memiliki slogan “KPKNL Semarang Luar Biasa”.

KPKNL Semarang memiliki Visi “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat di Wilayah Kerja KPKNL Semarang”. Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 30 PMK No. 154/PMK.06/2021, KPKNL Semarang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, lelang, dan penilaian. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut KPKNL memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa, pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Semarang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Kantor, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Kelompok

Jabatan Fungsional. Pegawai di KPKNL Semarang sendiri terdiri dari 45 Pegawai. Dari total 45 pegawai tersebut, 38 pegawai merupakan pegawai struktural dan 12 pegawai merupakan pegawai fungsional.

Gambar III.1 Struktur Organisasi KPKNL Semarang



Sumber: Situs DJKN Kementerian Keuangan terkait Profil KPKNL Semarang

3.3. Pembahasan Hasil

3.3.1. Pelaksanaan Pemeliharaan BMN di KPKNL Semarang Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

3.3.1.1. Perencanaan Pemeliharaan

KPKNL Semarang tidak menyusun RKBMN Pemeliharaan dalam perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMNnya. Berdasarkan pernyataan dari Narasumber B, pengajuan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan BMN di KPKNL Semarang tidak dilakukan dengan menyusun RKBMN Pemeliharaan

tetapi dengan menyusun RKA K/L KPKNL Semarang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Narasumber C yang menyatakan perencanaan anggaran untuk pemeliharaan BMN dilakukan dengan penyusunan RKA K/L dan tidak menggunakan RKBMN Pemeliharaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Narasumber B, penyusunan RKBMN di KPKNL Semarang hanya digunakan untuk RKBMN Pengadaan dan tidak untuk RKBMN Pemeliharaan. Setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi SIMAN Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta bagian Wasdal, ditemukan bahwa terdapat RKBMN Pemeliharaan untuk tahun 2019 dan 2021. Sistem SIMAN akan otomatis membuat RKBMN Pemeliharaan ketika satker menyusun RKBMN Pengadaan. Oleh karena itu, RKBMN Pemeliharaan tahun 2020 tidak ada karena pada tahun 2020 KPKNL Semarang tidak mengajukan RKBMN Pengadaan.

Biaya atau anggaran Pemeliharaan BMN yang ditetapkan oleh KPKNL Semarang untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 telah sesuai dengan standar biaya masukan yang ada. Berdasarkan keterangan dari Narasumber B dan C, pengajuan biaya atau anggaran pemeliharaan tidak mungkin melebihi standar biaya masukan karena penyusunannya sudah menggunakan aplikasi sehingga tidak dapat memasukkan nominal yang lebih tinggi dari standar biaya masukan.

3.3.1.2. Pelaksanaan Pemeliharaan

Tabel III. 2 Pemeliharaan BMN Berdasarkan Rincian Kertas Kerja KPKNL Semarang

	2019			2020			2021		
	Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Unit	Harga Satuan	Jumlah Biaya
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor									
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	6	Rp27.000.000	Rp162.000.000	7	Rp21.500.000	Rp150.500.000	6	Rp17.440.000	Rp104.640.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	5	Rp2.000.000	Rp10.000.000	7	Rp1.000.000	Rp7.000.000	5	Rp1.000.000	Rp5.000.000
Pemeliharaan Peralatan Perkantoran									
Pemeliharaan Printer	24	Rp120.000	Rp2.880.000	28	Rp200.000	Rp5.600.000	25	Rp370.000	Rp9.250.000
Pemeliharaan AC Split	16	Rp500.000	Rp8.000.000	16	Rp500.000	Rp8.000.000	9	Rp385.000	Rp3.465.000
Pemeliharaan Mesin Fotocopy	1	Rp1.109.000	Rp1.109.000	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Personal Computer Notebook	58	Rp30.500	Rp1.769.000	60	Rp240.000	Rp14.400.000	45	Rp530.000	Rp23.850.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor	43	Rp80.000	Rp3.440.000	47	Rp80.000	Rp3.760.000	48	Rp35.000	Rp1.680.000
Pemeliharaan Instalasi	12	Rp95.000	Rp1.140.000	12	Rp300.000	Rp3.600.000	-	-	-
Pemeliharaan Sound System	-	-	-	-	-	-	2	Rp500.000	Rp1.000.000
Pemeliharaan Scanner	8	Rp12.500	Rp100.000	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tabung Pemadam	5	Rp72.000	Rp360.000	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Faksimile	1	Rp221.000	Rp221.000	-	-	-	1	Rp500.000	Rp500.000
JUMLAH			Rp191.019.000			Rp192.860.000			Rp149.385.000

Sumber: diolah oleh penulis dari Rincian Kertas Kerja KPKNL Semarang

BMN di KPKNL Semarang yang dilakukan pemeliharaan ringan adalah mobil, motor, dan barang-barang elektronik seperti printer, AC Split, mesin, laptop atau komputer, dan lain-lain. Pemeliharaan ringan untuk mobil dan motor dilakukan dengan cara mencuci mobil dan motor ketika kotor, memanaskan mesin mobil dan motor sebelum digunakan, memarkirkan mobil dan motor di tempat yang teduh, dan menjaga isi tangki bahan bakar mobil dan motor di atas indikator “E” atau menjaga isi tangki bahan bakar di atas $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari kapasitas tangki bahan bakar. Sedangkan pemeliharaan ringan untuk barang-barang elektronik dilakukan dengan cara mematikan barang-barang tersebut ketika jam pulang kantor.

Pemeliharaan sedang hanya dilakukan terhadap BMN berupa mobil, motor, dan AC Split. Pemeliharaan sedang untuk mobil dan motor dilakukan dengan servis rutin tiap interval kilometer tertentu. Sedangkan pemeliharaan untuk AC Split dilakukan dengan cara pengecekan rutin oleh tenaga ahli setiap tiga bulan sekali.

Pemeliharaan BMN selain mobil, motor, dan AC Split hanya dilakukan kondisional atau insidental. Pemeliharaan kondisional atau insidental tersebut dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan berat karena pelaksanaannya yang tidak rutin.

Pemeliharaan baru dilakukan ketika terjadi kerusakan atau dirasa perlu dilakukan perbaikan. Contoh pemeliharaan kondisional yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Ketika *fuser* printer rusak dilakukan perbaikan oleh tenaga ahli.
- b. Ketika roda pada kursi kantor rusak dilakukan penggantian oleh tenaga ahli.
- c. Ketika terdapat keluhan dari pengguna laptop atau komputer kantor bahwa laptop atau komputernya performanya buruk, maka dilakukan penambahan RAM (*Random Access Memory*) dan penggantian memori dari HDD (*Hard Disk Drive*) ke SSD (*Solid State Drive*).
- d. Ketika terjadi permasalahan pada instalasi dilakukan perbaikan oleh tenaga ahli.

Pemeliharaan berat juga dilakukan terhadap mobil. Pemeliharaan berat dilakukan insidental atau ketika dirasa perlu ada perbaikan. Perbaikan tersebut terjadi di luar jadwal servis rutin mobil. Beberapa contoh penyebab dilakukannya perbaikan yang bersifat insidental adalah sebagai berikut.

- a. Ketika terjadi kerusakan pada kaki-kaki mobil atau *shockbreaker*.
- b. Ketika mobil tersendat-sendat atau mogok ketika digunakan.
- c. Ketika terjadi insiden yang mengakibatkan kerusakan pada eksterior mobil.

Terdapat beberapa barang seperti *scanner*, tabung pemadam, dan faksimile yang terdapat anggaran pemeliharaan pada tahun 2019 tapi pada tahun berikutnya tidak ada. Hal tersebut terjadi karena realisasi anggaran untuk pemeliharaan tersebut rendah atau pelaksanaan pemeliharaannya rendah sehingga diperkirakan pada tahun berikutnya tidak diperlukan anggaran untuk melakukan pemeliharaan

tersebut. Selain itu, terdapat anggaran untuk pemeliharaan mesin fotocopy di tahun 2019 tapi di tahun berikutnya tidak ada karena sejak tahun 2020 mesin fotocopy berasal dari sewa sehingga yang melakukan pemeliharaan adalah pihak yang menyewakan. Sebaliknya, terdapat barang seperti *sound system* yang pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat anggaran pemeliharaan tetapi pada tahun 2021 terdapat anggaran pemeliharaan. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan untuk pelaksanaan pemeliharaan baru muncul ketika tahun 2021.

Terdapat perbedaan pelaksanaan Pemeliharaan BMN sebelum dan selama pandemi Covid-19, kecuali untuk pemeliharaan AC Split dan motor. Perbedaan tersebut antara lain.

a. Pemeliharaan mobil

Pemeliharaan pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) lebih sering dibandingkan pada tahun 2020 (selama pandemi Covid-19). Hal tersebut dikarenakan target kinerja pada tahun 2020 tidak sebanyak tahun 2019 sehingga perjalanan dinas yang dilakukan pada tahun 2020 tidak sebanyak tahun 2019. Namun, pada tahun 2021 ketika pandemi telah mereda target kinerja mulai meningkat sehingga menyebabkan perjalanan dinas kembali sering dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan pemeliharaan pada tahun 2021 lebih sering dilakukan dibandingkan tahun 2020.

b. Pemeliharaan untuk barang selain mobil, motor, dan AC Split

Pelaksanaan pemeliharaan untuk selain mobil, motor, dan AC Split sebelum pandemi Covid-19 dilakukan di kantor dengan cara tenaga ahli atau teknisi datang ke kantor untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan. Ketika

pandemi Covid-19 terjadi pihak selain pegawai dilarang untuk memasuki area kantor sehingga apabila diperlukan pemeliharaan maka pegawai akan membawa barang yang perlu dilakukan pemeliharaan ke luar kantor, kemudian tenaga ahli akan membawa barang tersebut untuk diperbaiki atau dilakukan pemeliharaan dan ketika sudah selesai barang tersebut dikirim kembali ke kantor. Pemeliharaan AC Split tetap dilakukan di kantor karena selain tenaga ahli tidak dapat mengecek atau melepas AC untuk dibawa keluar kantor.

3.3.1.3. Pelaporan Pemeliharaan

Pencatatan pemeliharaan atas pemeliharaan yang telah dilakukan tidak dilakukan oleh Narasumber B selaku pengurus barang. Selain itu, Kuasa Pengguna Barang juga tidak membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang.

3.3.1. Kendala yang Dihadapi KPKNL Semarang dalam Pelaksanaan Pemeliharaan BMN Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Pemeliharaan BMN di KPKNL Semarang sebelum pandemi Covid-19 tidak mengalami kendala. Sebaliknya, selama pandemi Covid-19, tepatnya pada tahun 2021 ketika pandemi sudah mereda, terdapat kendala yang dihadapi oleh KPKNL Semarang.

Pada tahun 2021, terdapat kendala pada pemeliharaan mobil. Kendala terjadi karena anggaran untuk pemeliharaan mobil di tahun 2021 menurun sedangkan intensitas perjalanan dinas yang dilakukan lebih tinggi dibanding tahun 2020 sehingga membutuhkan pemeliharaan yang lebih sering. Terlihat dari Tabel III. 2 bahwa anggaran tahun 2021 turun menjadi Rp17.440.000 per mobil dibandingkan Rp21.500.000 per mobil di tahun 2020. Permasalahan juga terjadi

karena anggaran tidak hanya digunakan untuk servis rutin dan perbaikan, tetapi juga untuk biaya mengisi bahan bakar. Hal tersebut mengakibatkan apabila anggaran digunakan untuk pemeliharannya sepenuhnya, maka sisa anggaran tidak akan mencukupi untuk mengisi bahan bakar yang digunakan ketika perjalanan dinas karena wilayah kerja KPKNL Semarang yang cukup luas yaitu mencakup 13 kabupaten dan kota.

Pada tahun 2020, tidak terdapat kendala seperti pada tahun 2021 karena persebaran pandemi Covid-19 yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pembatasan aktivitas sosial yang lebih ketat sehingga target kinerja pada tahun 2020 tidak setinggi tahun 2021 sehingga perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesering tahun 2021. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia masih mencukupi untuk pemeliharaan mobil.

3.3.2. Solusi atas Kendala yang Dihadapi KPKNL Semarang dalam Pelaksanaan Pemeliharaan BMN Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Terdapat dua solusi yang telah dilakukan KPKNL Semarang untuk mengatasi kendala dalam pemeliharaan mobil. Solusi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mengalokasikan sebagian uang perjalanan dinas yang diterima oleh pegawai untuk mengisi bahan bakar

Ketika seorang pegawai melakukan perjalanan dinas mereka akan menerima uang perjalanan dinas. Uang tersebut sebagian disisihkan dan akan digunakan untuk mengisi bahan bakar sehingga bagian anggaran untuk

pemeliharaan mobil yang tadinya digunakan untuk mengisi bahan bakar dapat digunakan untuk melakukan servis dan perbaikan.

b. Memprioritaskan mobil tertentu dalam pemeliharaan

Mobil yang menjadi prioritas pemeliharaan adalah mobil dinas jabatan. Mobil tersebut menjadi prioritas karena terkadang digunakan untuk menjemput pejabat seperti Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan pejabat-pejabat lain ketika mereka berkunjung ke daerah Kota Semarang dan sekitarnya. Selain mobil dinas jabatan, mobil yang menjadi prioritas adalah mobil yang memiliki urgensi paling tinggi untuk segera diservis atau diperbaiki di bengkel.